

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Teoritis

1. Bank BUMN

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dukungan dan pembiayaan juga peran serta lembaga keuangan. Salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi adalah bank. Definisi bank umum menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dikenal 2 (dua) jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu:

1) Bank Umum : BUMN, swasta, dan campuran.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya, keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya ayat (2) dan (3). Ayat 2 berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan pada ayat (3) berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan oleh Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya. Guna menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu badan usaha milik negara, yang semula dikenal dengan sebutan perusahaan negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut.

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN). Undang-undang ini memberikan pengertian dari BUMN itu sendiri. Pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hal yang membedakan antara BUMN

dengan badan hukum lainnya adalah: (1) Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. (2) Melalui penyertaan secara langsung. Dan (3) Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan adanya penegasan bahwa BUMN merupakan suatu badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, seakan-akan UU BUMN memberi pesan bahwa BUMN harus dikelola secara mandiri dan profesional untuk mencapai suatu tujuan usaha, yaitu keuntungan (*profit*).

Bank BUMN merupakan badan usaha perbankan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Daftar Bank BUMN menurut Indonesia Stock Exchange (IDX) adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Kegiatan utama Bank BUMN sebenarnya sama dengan bank umum yaitu menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Manurung dan Raharja, 2004). Fungsi dan peran Bank BUMN sama dengan bank umum lainnya yaitu sebagai penghimpun, penyalur, dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Bank BUMN penting dalam perkeonomian modern, seperti: (1) mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, (2) penghimpun dana simpanan, (3) mendukung kelancaran transaksi

internasional, (4) penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, (5) dan pemberian jasa-jasa lainnya.

2. Kredit

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007) dalam bukunya berjudul “Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil” mendefinisikan bahwa kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut :“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006 : 114).

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2003 :163).

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis kredit dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Tujuan penggunaan kredit menurut tujuan penggunaannya dibedakan menjadi kredit konsumtif dan kredit produktif. (2) Menurut jangka waktu, kredit menurut jangka waktu dibedakan menjadi kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. (3) Menurut sifat penggunaannya, kredit dibedakan menjadi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. (4) menurut sifat penarikannya, kredit dibedakan menjadi kredit langsung dan kredit tidak langsung. (5) menurut risiko pembiayaannya, kredit dibedakan menjadi, kredit dengan dana bank bersangkutan, kredit sindikasi, dan kredit partisipasi (Mahmoedin,2002).

Konsep Kredit Bank BUMN

Tujuan utama penyaluran kredit adalah : (1) Memperoleh pendapatan bunga, (2) Memprofitkan dana yang ada, (3) Melaksanakan kegiatan operasional bank, (4) memenuhi permintaan kredit masyarakat, (5) memperlancar lalu lintas pembayaran, (6) menambah modal kerja perusahaan, (7) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kredit bagi masyarakat adalah (1) menjadi motivator kegiatan perdagangan dan usaha, (2) memperluas lapangan kerja masyarakat, (3) memperlancar arus barang dan arus uang, (4) mengubah cara pikir masyarakat agar lebih ekonomis.

Sebagian besar penerimaan bank berasal dari bunga kredit karena porsi kredit dalam aktiva bank sangat besar. Menurut Martono, prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep *6C* (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, Constraint*). Pada dasarnya konsep *6C* ini akan dapat memberikan informasi mengenai tekad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Penyaluran kredit juga dapat dipengaruhi oleh *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Latu Maerissa (1999:106) NPL dapat diartikan sebagai kredit yang penagihan kembali hutang pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan bank. Semakin tinggi NPL menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit semakin berkurang.

Sebaliknya apabila NPL rendah maka dana yang disalurkan akan meningkat (Harmanta, 2005:67). Kredit dapat dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibandingkan jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Kredit tak lancar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

1. Kredit Kurang Lancar. Kredit digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria: a) terdapat angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, b) Frekuensi mutasi rendah, c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari, d) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, e) Dokumentasi pinjaman lemah.
2. Kredit Diragukan. Kredit digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria: a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari, b) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari, c) Terjadi cerukan yang bersifat permanen, d) Terjadi kapitalisasi bunga, e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.
3. Kredit Macet. Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria: a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari, b) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru, c) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

Teori Analisis Kredit

Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan keabsahan juga kelayakan surat/data/berkas permohonan calon debitur hingga dikeluarkannya surat keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. (Djohan 2000:97). Pemberian kredit oleh abnk kepada debitur merupakan penempatan aktiva produktif kepada aktiva beresiko. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor: 72/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum pada Pasal 1 angka 3: Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat disamakan dengan itu.

Menurut Thomas Suyatno, dkk (2003:70) yang dimaksud dengan analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan. Laporan tersebut berisi penguraian dan kesimpulan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, pengertian penilaian atau analisis kredit adalah suatu kegiatan analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit, sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh bank.

3. *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) adalah persentase antara kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan. Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dan selalu ada dalam setiap penyaluran kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa ketidakmampuan debitur untuk melakukan pelunasan kredit yang diterimanya, pada waktu yang telah dijanjikan sebelumnya. Kredit bermasalah dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku pemberi kredit, melainkan juga terhadap debitur penerima kredit, sebab kredit ini bagaimanapun juga harus diselesaikan, bahkan dapat merugikan dunia perbankan dan stabilitas perekonomian nasional dalam skala besar.

Kata “bermasalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu juga dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan.

Adapun H. As. Mahmoeeddin, mengemukakan beberapa defenisi mengenai kredit bermasalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar
- 2) Kredit bermasalah adalah kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratanyang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaranbunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatandan peningkatan agunan dan sebagainya.
- 3) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehinggaterjadi tunggakan.
- 4) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehinggamerlukan tindakan hukum yang menagihnya
- 5) Kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung potensi untuk merugikan bank.
- 6) Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktutertentu.

Menurut Sutojo (2000), kredit bermasalah dapat dikategorikan menjadi 3 dalam praktek yang lazim di dunia perbankan yaitu:

1. Terjadinya keterlambatan pembayaran bunga dan atau kredit induk, lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.
2. Kredit yang terhutang tidak dilunasi sama sekali
3. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Melalui Peraturan Bank Indonesia, BI menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%. Rasio NPL dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2011) ::

$$NPL = (Kredit\ Bermasalah / Total\ Kredit) \times 100\%$$

Faktor intern bank, faktor intern debitur, dan faktor ekstern di luar bank maupun debitur merupakan 3 faktor utama penyebab terjadinya NPL pada sektor perbankan. Dari sisi intern bank, kelemahan pengelola kredit di bank dan tekanan pihak ketiga agresifitas bank dalam menyalurkan kredit, lemahnya sistem pengawasan, campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham, jaminan yang tidak memadai dan tidak mengcover kredit (Sutojo, 2001), itikad kurang baik pemilik bank, pengurus dan pegawai bank (Tangkilisan, 2003).

Dari sisi ketidaklayakan debitur faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di bank adalah mis manajemen, kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik usaha (Sutojo, 2000). Menurut Sutojo, faktor ekstern bank dan debitur yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya NPL adalah penurunan kondisi ekonomi moneter negara, usaha, bencana alam, peraturan pemerintah (Sutojo, 2000), resesi, devaluasi, inflasi, deflasi, kebijakan moneter lainnya, meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman (Sukardjono, 2003), perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil meliputi melemahnya kurs nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing.

Tingginya NPL dapat mempengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya yaitu bank menjadi lebih berhati-hati. Bank yang mengalami peningkatan penyaluran kredit akan memiliki kemungkinan adanya NPL (*Non*

Performing Loan) yang meningkat sejalan dengan beban. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan modal bank. Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPL yang dapat mempengaruhi pertumbuhan modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah modal yaitu pembagian deviden yang tidak seimbang dengan laba ditahan karena modal bersih bank mencerminkan jumlah dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat (Budiawan, 2008).

Semakin tinggi NPL menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar, sehingga dana yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit semakin berkurang. Sebaliknya semakin rendah NPL menyebabkan bank membentuk cadangan penghapusan yang lebih kecil sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit menjadi semakin besar (Harmanta, 2005:67). Bila tingkat NPL dalam suatu bank relatif tinggi, bank harus menurunkan NPL dengan cara menutupi dengan biaya cadangan yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana cadangan yang keluar dari bank otomatis membuat laba bank tersebut menurun, sehingga bila hal tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dapat menyebabkan bank gulung tikar.

4. Inflasi

Menurut Sun'an dan Kaluge, pengertian inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara terus-menerus dan umum. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada barang-barang lainnya, kecuali jika kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan kepada barang-baranglainnya. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode

lainnya, dan berbedapula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitumencapai dibawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4– 10 persen. Inflasi yang sangat serius mencapai tingkat beberapa puluh ataubeberapa ratus dalam setahun.Indikator inflasi adalah:

1. Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer pricing index merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK diperoleh berdasarkan survey bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283 – 397 jenis barang / jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

Macam-macam inflasi berdasarkan tingkatannya (Samuelson & Nordhaus, 2004:385) adalah :

1. Inflasi rendah

Inflasi rendah dicirikan oleh harga yang naik perlahan-lahan dan dapat diramalkan. Kita dapat mendefinisikan sebagai tingkat inflasi tahunan dengan digit tunggal.

2. Inflasi yang melambung

Inflasi dalam cakupan digit ganda atau triple, misalnya 20, 100, atau 200

persen per tahun disebut “inflasi melambung”. Ketika inflasi melambung menjadi berakar, distorsi ekonomi serius timbul. Pada kondisi ini uang kehilangan nilainya dengan sangat cepat, sehingga orang-orang hanya akan memegang uang dengan jumlah yang sangat minim yang dibutuhkan untuk transaksi sehari-hari saja.

3. Hiperinflasi

Disebut hiperinflasi adalah suatu keadaan harga-harga meningkat seribu, atau jutaan atau bahkan miliaran persen per tahun. Terdapat beberapa ciri dari hiperinflasi, yaitu: Pertama, stok uang nyata menurun dengan drastis. Kedua harga menjadi relatif sangat tidak stabil.

Secara teoritis variabel inflasi mempengaruhi jumlah kredit secara tidak langsung tetapi melalui berbagai jalur. Inflasi akan mempengaruhi tingkat suku bunga BI, selanjutnya suku bunga BI akan mempengaruhi kondisi internal bank. Ketika naiknya suku bunga BI akan menyebabkan naiknya suku bunga deposito, suku bunga tabungan. Kenaikan suku bunga deposito akan berpengaruh terhadap suku bunga kredit. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat inflasi dengan penyaluran kredit (Sun'an dan Kaluge, 2007). Tingkat inflasi merupakan variabel ekonomi makro paling penting dan paling ditakuti oleh para pelaku ekonomi termasuk pemerintah, karena dapat membawa pengaruh buruk pada struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan. Ekspektasi laju inflasi sangat mempengaruhi para investor dalam melakukan kegiatannya, dan berpengaruh terhadap keputusan permintaan dana kredit perbankan.

Teori Kuantitas Irving Fisher

Teori permintaan uang yang dikembangkan atas dasar pemikiran aliran klasik atau lebih dikenal dengan Teori Kuantitas Uang menjelaskan peranan uang terhadap perekonomian secara umum yang pertama kali dijelaskan oleh Irving Fisher pada tahun 1911 melalui *The Quantity Theory of Money* yang termuat dalam bukunya berjudul *The Purchasing Power of Money*.

Teori ini berpandangan bahwa terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum (inflasi). Teori kuantitas uang menggambarkan kerangka yang jelas mengenai hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi. Analisis Fisher dalam teori ini mengacu pada persamaan pertukaran (*equation of exchange*) yang dirumuskan sebagai :

$$M.V = P.T$$

Keterangan:

M = jumlah uang beredar

V = velocity of money

P = harga barang dan jasa

T = volume transaksi

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah uang beredar dikalikan dengan velositas uang akan sama dengan nilai transaksi. Persamaan tersebut dapat dikembangkan menjadi teori tentang peranan uang dalam perekonomian dengan cara melihat perilaku setiap variabel-variabel dalam persamaan berikut:

1. jumlah uang beredar merupakan variabel eksogen yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah dan bank sentral sebagai otoritas moneter.
2. variabel tingkat harga merupakan variabel residu yang nilainya ditentukan oleh hasil interaksi ketiga variabel lainnya. Harga diasumsikan fleksibel, sehingga harga dapat menyesuaikan atau bergerak naik atau turun
3. variabel velositas menunjukkan berapa kali uang berpindah tangan dalam suatu periode tertentu. Variabel ini tidak tergantung pada jumlah uang beredar (asumsi klasik). Artinya perubahan dalam jumlah uang beredar tidak mempengaruhi velositas. jika jumlah uang beredar bergerak berlawanan dengan variabel velositas maka perubahan jumlah uang beredar akan dinetralkan oleh perubahan velositas yang tidak akan berpengaruh terhadap tingkat harga dan volume transaksi
4. variabel transaksi merupakan jumlah keseluruhan transaksi pada suatu selang waktu tertentu. Perilaku variabel tersebut dapat dijelaskan baik dalam perilaku jangka pendek maupun jangka panjang.

Jika kita mengacu pada teori kuantitas uang tersebut, maka penyebab utama dari satu-satunya yang memungkinkan inflasi muncul adalah terjadinya kelebihan uang sebagai akibat penambahan jumlah uang beredar di masyarakat. inflasi hanya semata-mata merupakan gejala moneter. Artinya, perubahan indeks harga umum hanya diakibatkan oleh perubahan jumlah uang beredar. Jika bank Sentral ingin mencapai dan memelihara tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka yang harus dilakukan adalah mengendalikan atau mengontrol jumlah uang beredar.

Pengaruh Inflasi Terhadap NPL

Berdasarkan teori, inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara dan kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Bagaimana inflasi dapat berpengaruh terhadap kredit bermasalah? Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat suku bunga riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah. Dengan meningkatnya inflasi maka akan mengakibatkan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan kreditnya juga akan terganggu (Basri 2002, hal 53).

Sebelum inflasi meningkat, seorang debitur masih sanggup untuk membayar angsuran kreditnya, namun setelah inflasi terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat. Lalu seandainya suku bunga kreditnya tidak tetap (floating rate), maka hal tersebut akan memperparah kondisi debitur sebab suku bunga kredit akan meningkat dikarenakan suku bunga BI juga

meningkat. Dengan kondisi tersebut maka kemungkinan besar pinjaman debitur tersebut akan macet karena debitur tidak dapat membayar angsuran kreditnya. Dan jika sebagian besar debitur bank tidak dapat membayar angsuran kreditnya maka dapat dipastikan Non Performing Loan (NPL) bank akan meningkat.

5. Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI)

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah permintaan dan penyaluran di pasar uang domestik. Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah investasi di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun dari investor asing. Apabila dalam suatu negara terjadi peningkatan aliran modal masuk (*capital inflows*) di luar negeri, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap mata uang asing di pasar valuta asing (Wardane, 2003).

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2003) penentuan suku bunga bagi bank konvensional adalah penentuan harga (*price*) dari komoditi yang diperjual belikan oleh bank yaitu dana atau uang. Penentuan suku bunga yang dihimpun merupakan harga beli, sedangkan penentuan suku bunga kredit atau penempatan atau penanaman dana merupakan harga jual dana bank yang bersangkutan. Konsep *pricing* pada perbankan ini pada umumnya didasarkan atas dasar konsep perhitungan biaya dana bank yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana

yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum (*reserve requirement*) yang selalu dipelihara bank.

Tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan uang (ditentukan dalam pasar uang), menurut Keynes. Perubahan tingkat suku bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, misalnya pada surat berharga, dimana harga dapat naik atau turun tergantung pada tingkat bunga (bila tingkat bunga naik maka surat berharga turun dan sebaliknya), sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan menderita *capital loss* atau *gain*.

Suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan.
2. Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi (Wardane, 2003)

Menurut Sutojo (2000), semakin tinggi tingkat resiko kredit maka akan semakin tinggi pula tingkat suku bunga yang diminta bank. Hal ini disebabkan kreditur harus mempunyai cadangan untuk menutup tambahan resiko kredit yang beresiko tinggi dibandingkan kredit dengan tingkat resiko normal. Resiko bunga muncul dimana biaya dana di pasar uang naik lebih tinggi dari suku bunga yang dibebankan kepada debitur sehingga terjadi mismatch pricing, yaitu

keitidakcocokan antara biaya dana yang harus dibayar bank dan suku bunga kredit yang mereka bebaskan kepada debitur.

Pengaruh Suku Bunga Kredit Investasi Terhadap NPL

Meningkatnya suku bunga kredit investasi dipicu karena adanya kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang menyesuaikan meningkatnya inflasi. Kenaikan suku bunga kredit investasi akan memperparah kondisi debitur yang kesulitan membayar kredit. Hal ini disebabkan debitur akan mengalami kesulitan pemenuhan konsumsi karena adanya inflasi. Dengan kondisi tersebut maka kemungkinan besar pinjaman debitur tersebut akan macet karena debitur tidak dapat membayar angsuran kreditnya. Dan jika sebagian besar debitur bank tidak dapat membayar angsuran kreditnya maka dapat dipastikan Non Performing Loan (NPL) bank akan meningkat.

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pada setiap akhir tahun, masing-masing negara selalu mengumpulkan data-data statistiknya yang berkenaan dengan tingkat pertumbuhan GNP relatifnya, dan dengan penuh harap mereka menantikan munculnya angka-angka pertumbuhan ekonomi, karena berhasil-tidaknya program-program pembangunan di suatu negara dunia sering dinilai berdasarkan tinggi-rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Makin tingginya angka pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penambahan pengetahuan, penambahan kemampuan berorganisasi, penggunaan teknologi, dan peningkatan keterampilan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terhadap NPL

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk. Bila di suatu negara laju pertumbuhan ekonominya lambat, peluang NPL pun akan meningkat. Karena masyarakat sebagai debitur akan kesulitan membayar kredit.

Pengaruh Antar Variabel Bebas Terhadap NPL

Apabila Inflasi meningkat, maka Bank Indonesia akan mengeluarkan berbagai instrumen guna berusaha untuk menurunkan tingkat Inflasi, salah satunya mengendalikan Suku Bunga Bank Indonesia. Bila tingkat inflasi naik, maka suku bunga Bank Indonesia pun akan dinaikkan di atas inflasi, hal ini otomatis akan menaikkan suku bunga bank-bank di seluruh Indonesia. Dengan naiknya suku

bunga tabungan, maka masyarakat akan tertarik untuk menabung, dan jumlah uang beredar di masyarakat pun akan berkurang. Tetapi, hal ini akan berdampak pada NPL, dimana Suku Bunga Kredit Investasi akan meningkat dan debitur yang sudah mengalami kesulitan dalam membayar kredit karena inflasi, debitur sulit mengambil keputusan dalam membayar kredit atau memenuhi kebutuhan, debitur juga akan semakin dibebankan dengan biaya bunga tambahan yang diberikan oleh bank. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil akan mempengaruhi tingkat NPL semakin membaik, dikarenakan debitur mempunyai tingkat pendapatan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan, membayar kredit, dan menabung.

B. Empiris

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan NPL pada Perbankan di Sumatera Utara”

Kategori	Karakteristik Penting
Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan NPL pada Perbankan di Sumatera Utara
Penulis	Suryanti Lubis, 2006
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap meningkatnya NPL di perbankan Sumatera Utara 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh SBI terhadap meningkatnya NPL di perbankan Sumatera Utara 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap meningkatnya NPL di perbankan Sumatera Utara
Variabel	NPL, SBI, Inflasi, PDRB
Model/Metode	OLS (Ordinary Least Square)
Kesimpulan	Berdasar hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel SBI, PDRB, Inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel NPL.

Dalam penelitiannya Suryanti Lubis (2006) menjelaskan gambaran perekonomian Sumatera Utara yang dapat dilihat dalam dua periode yaitu masa sebelum krisis moneter dan setelah krisis moneter. Sebelum krisis moneter perekonomian

Sumatera Utara berkembang cukup baik, namun setelah krisis melanda Indonesia tahun 1997 perekonomian Sumatera Utara mengalami perlambatan yang terlihat dari laju inflasi yang tinggi, serta PDRB yang menurun, namun memasuki tahun 2000 perekonomian perlahan-lahan bangkit kembali hingga tahun 2005, krisis moneter yang melanda turut mempengaruhi perkembangan perbankan di Sumatera Utara, dimana pada masa itu kondisi perbankan mengalami kemunduran dari tahun sebelumnya, namun kembali menunjukkan perbaikan memasuki tahun setelah krisis moneter. Kondisi ini terlihat dari adanya peningkatan dana yang dihimpun maupun dana yang disalurkan serta berjalannya kembali fungsi perbankan sebagai lembaga pendukung perekonomian.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian “Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Kinerja keuangan Bank Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas pada PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK”

Kategori	Karakteristik Penting
Judul	Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas pada PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Penulis	Andi Priyo Utomo, ST,2008
Tujuan	Untuk mengetahui Pengaruh NPL terhadap Rasio Solvabilitas, rasio Likuiditas, dan Rasio Profitabilitas pada Bank Mandiri
Variabel	NPL, Rasio Solvabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas
Model / Metode	Analisis Korelasi dan OLS (Ordinary Least Square) serta dana sekunder berupa laporan keuangan triwulan Periode 2004-2007
Kesimpulan	Berdasar hasil pengujian menunjukkan bahwa 5 variabel yang dipengaruhi oleh NPL adalah : <i>Primary ratio, Capital Ratio, Capital Adequacy Ratio, Net Profit Margin Return On Equity Capital, dan Return on Total Assets</i> , sedangkan 7 variabel yang tidak dipengaruhi NPL adalah : <i>Quick Ratio, Assets to Loan Ratio, Loan to Deposits Ratio, Rate Return on Loan, Interest Margin on Earning Assets, and Interest Margin on Loans.</i>

Dalam penelitiannya Andi Priyo Utomo, ST. (2008) menjelaskan bahwa meningkatnya NPL akan mengurangi jumlah modal bank, selain itu meningkatnya NPL akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan kredit pada periode berikutnya. Kondisi seperti ini akan mengurangi perkembangan deviden dan laba ditahan atau modal. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan salah satu bank yang terkena dampak dari kenaikan NPL. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan triwulan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Dan metode yang digunakan adalah analisis korelasional.

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian “Analisis Non Performing Loan pada PT Bank Sumut Capem Sei Rampah”

Kategori	Karakteristik Penting
Judul	Analisis Non Performing Loan pada PT Bank Sumut Capem Sei Rampah
Penulis	Mayanti Jumiahari Harahap, 2008
Tujuan	Untuk menilai apakah Non Performing Loan (NPL) tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, dan juga untuk mengetahui pengaruh variabel kondisi keuangan debitur, kegiatan usaha, sikap debitur, sikap bank dan force majeure terhadap penyebab terjadinya NPL.
Variabel	Kondisi keuangan debitur, kegiatan usaha, sikap bank, sikap debitur dan force majeure
Model / Metode	Analisis deskriptif dan metode regresi berganda
Kesimpulan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun persentase NPL untuk Kredit Angsuran Lainnya (KAL) pada PT Bank SUMUT Capem Sei Rampah sudah baik atau pada kondisi sehat yaitu rata-rata < 5% dari total kredit.

Dalam penelitiannya Mayanti Jumiahari Harahap (2008) menjelaskan bahwa kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, oleh karena itu setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, ditambah kredit diragukan, dan kredit macet. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan maka akan berdampak pada berkurangnya sebagian besar pendapatan. Kredit macet tidak menghasilkan pendapatan bunga sama sekali, sehingga pendapatan bank berkurang. Akibatnya laba bank akan menurun dan apabila kredit macet ini terjadi pada suatu skala yang cukup besar, bank akan mengalami kerugian. Dari hasil penelitian ini juga didapat bahwa variabel kondisi keuangan debitur, kegiatan usaha, sikap bank, sikap debitur dan force majeure mempunyai pengaruh positif terhadap faktor penyebab NPL pada PT Bank SUMUT Capem Sei Rampah.

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian “Credit Growth, Problem Loans & Credit Risk Provisioning in Spain”

Kategori	Karakteristik Penting
Judul	Credit Growth, Problem Loans & credit Risk Provisioning in Spain
Penulis	Fernandez de Lis, Jorge Martinez Pages & Jesus Saurina, 2000
Tujuan	Untuk mengetahui hubungan Problem Loan dengan Laju Pertumbuhan GDP dan resiko kredit yang terjadi di Spanyol
	Bank Loans, GDP, Net Acquisition of Financial Assets, Wealth Indicators, Housing Price Index, Net Financial of Non Financial Firms & Household, Memorandum Items : Annual Inflation Rate (CPI), 3 Month Interbank Real Interest Rate Indicators of Bank Health : Non Performing Ratio Indicators of Banking Crisis, Real Profitability before taxes, (over own funds)
Model / Metode	Simple Algebra & Statistical
Kesimpulan	Terdapat hubungan yang negative antara Problem Loan dengan laju pertumbuhan GDP, dimana problem loan bertambah tinggi ketika laju pertumbuhan GDP rendah

Dalam penelitiannya Fernandez de Lis, Jorge Martinez Pages & Jesus Saurina, (2000), menjelaskan tentang Pertumbuhan kredit, Problem loan dan Resiko kredit di Negara Spanyol yang mana menggunakan beberapa variabel yang dianalisis menggunakan metode Algebra & Statistical. Dalam penelitian ini menghasilkan

bahwa terdapat hubungan negatif antara Problem Loan dengan laju pertumbuhan GDP, dimana problem loan akan bertambah tinggi ketika laju pertumbuhan GDP rendah.

Tabel 2.5 Ringkasan Penelitian “Problem Loans & Cost Efficiency in Commercial Bank”

Kategori	Karakteristik Penting
Judul	<i>Problem Loans & Cost Efficiency in Commercial Bank</i>
Penulis	Allen N. Berger & Robert De Young (1997)
Tujuan	Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya problem loans dan cost efficiency di Bank komersil
Variabel	NPL, <i>Cost Efficiency (X-EFF)</i> , <i>Equity Capital Ratio (CAP)</i> RWA (<i>Risk Weighted Asset Ratio</i>)
Model / Metode	<i>Granger Causality Model</i>
Kesimpulan	Diperoleh bahwa Bad Luck, Bad Management, Skimping dan Moral Hazard merupakan penyebab terjadinya problem loans (kredit bermasalah)

Dalam penelitiannya Allen N. Berger & Robert De Young (1997), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya problem loans yaitu Bad Luck, Bad Management, Skimping dan Moral Hazard. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPL, *Cost Efficiency (X-EFF)*, *Equity Capital Ratio (CAP)* RWA (*Risk Weighted Asset Ratio*), yang mana variabel-variabel tersebut

digunakan untuk mengukur kredit bermasalah dan biaya efisien pada bank komersil.

Tabel 2.6 Ringkasan Penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL (Non Performing Loan) Pada Bank Umum di Indonesia (Periode 2005:01 – 2010:12)”

Kategori	Karakteristik Penting
Judul	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL (Non Performing Loan) Pada Bank Umum di Indonesia (Periode 2005:01 – 2010:12)</i>
Penulis	Masito Kurnia Dewi (2011)
Tujuan	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio), LDR (Loan Deposit Ratio), KAP (Kualitas Aktiva Produktif) dan Tingkat suku bunga kredit terhadap NPL (Non Performing Loan) pada Bank Umum di Indonesia
Variabel	NPL, CAR, LDR, SBK
Model / Metode	Regresi Linier Berganda
Kesimpulan	Diperoleh bahwa LDR berpengaruh positif terhadap NPL, CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh negatif terhadap NPL, Suku Bunga kredit Investasi (SBKI) berpengaruh positif terhadap NPL.

Dalam penelitiannya Masito Kurnia Dewi (2011), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya problem loans yaitu Loan Deposit

Ratio (LDR), dan Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) . Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPL, Loan Deposit Ratio (LDR), Capital Asset Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) yang mana variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengukur NPL pada Bank Umum di Indonesia.